

ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT

(ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE)

Deskripsi Mata Ujian

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ujian ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memahami konsep etika bisnis dan etika profesi akuntan profesional.
2. Mengidentifikasi isu-isu etika individu dan organisasi.
3. Mengevaluasi iklim etika organisasi.
4. Mengambil keputusan secara etis.
5. Menjalankan perannya sebagai akuntan profesional untuk menegakkan tata kelola yang baik.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang berlaku global.
7. Memahami manfaat dari praktek tata kelola korporat yang baik
8. Menganalisis dan mengevaluasi praktik tata kelola korporat.
9. Memahami prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat yang berlaku global.
10. Menganalisis dan mengevaluasi praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat.
11. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dan tanggung jawab korporat.

Referensi

A. Etika Profesi

Buku

- Leonard J. Brooks and Paul Dunn (2012). *Business & Professional Ethics for Directors, Executives and Accountants*. South-Western College Publishing, 6th edition. (BD)
- Ronald F. Duska, B.S. Duska, J. Ragatz (2011). *Accounting Ethics*. Blackwell Publishing, 2nd edition. (DDR)

Kode Etik

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Kode Etik Pemeriksa Keuangan Negara*. (BPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Kode Etik Internal Auditor*. (BPKP)
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Kode Etik Akuntan Profesional*. (IAI)
- International Federation of Accountants (2011). *Competent and Versatile: How Professional Accountants in Business Drive Sustainable Organizational Success*. (IFAC 2011)

- International Federation of Accountants (2013). *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*. (IFAC 2013)
- Institut Akuntan Publik Indonesia. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. (IAPI)

Artikel

- CCAB. *Ethical Dilemmas Case Studies: Professional Accountants in Business*. <http://www.icaew.com/~media/Files/Technical/Ethics/ethical-case-studies/ccabeg-case-studies-accountants-business.pdf>
- CCAB. *Ethical Dilemmas Case Studies: Professional Accountants Working as Non-Executive Directors*. <http://www.icaew.com/~media/Files/Technical/Ethics/ethical-case-studies/ccabeg-case-studies-accountants-as-neds.pdf>
- Harvard Business Review (2011). “*Spotlight on the Good Company: Why Don’t We Try to Be India’s Most Respected Company?*”
- Max H. Bazerman, George Loweinstein, and Don A. Moore (2002), “*Why Good Accountants do Bad Audits*”. Harvard Business Review November 2002.
- Michael Jensen. “*Integrity: Without It Nothing Works*”. Rotman Magazine Fall 2009.

Video

The Corporation (2003), sutradara Jennifer Abbott & Mark Achbar, produser Mark Achbar & Bart Simpson, produksi Big Picture Media Corporation.

B. Tata Kelola korporat

Buku dan Laporan

- ACMF-ADB. *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assessments 2012-2013*. <http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-2013>
- Ikatan Komite Audit Indonesia – PWC Indonesia (2013) *Manual Komite Audit*.
- KPMG (2008). *Internal Audit’s Role in Effective Corporate Governance*. <http://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Internal-audit's-role-in-effective-corporate-governance.pdf>
- OECD (2009). *Guide for Fighting Abusive Related Party Transactions in Asia*. <http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/43626507.pdf>
- Rezaee, Zabihollah (2009) *Corporate Governance and Ethics*, John Wiley. (ZR)
- World Bank (2010) *Report on Observance Standards and Codes: Corporate Governance Country Assessment: Indonesia*. http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_idn_2010.pdf dan http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_idn_annex.pdf.

Artikel

- Claessens et al. (2002) *The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations*. Journal of Financial Economics 58, 81-112.
- Gwilliam dan Marnet (2007). *Audit within the Corporate Governance Paradigm*. <http://www.st-andrews.ac.uk/business/ecas/7/papers/ECAS-GwilliamMarnet.pdf>
- Utama, S. (2010). *An evaluation of support infrastructures on corporate responsibility reporting in Indonesia*. Asia Business & Management Vol 10 No. 3, 405-424.

Aturan, Pedoman, dan Instrumen

- Aturan-aturan yang terkait dengan *corporate governance*, yaitu UU Perseroan RI, UU Pasar Modal, dan berbagai aturan OJK/BEI. Undang-Undang dan aturan tersebut dapat diunduh dari Internet dan situs OJK/Bapepam-LK.
- ACMF. *ASEAN Corporate Governance Scorecard Template*, www.theacmf.org/ACMF/upload/asean_cg_scorecard.pdf.
- Global Reporting Initiative. *Sustainability Reporting Guideline*, <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.
- Organization for Economic Cooperation and Development (2004) *OECD Principles of Corporate Governance*.
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf>.

SILABI ETIKA PROFESI & TATA KELOLA KORPORAT

MATERI DAN SUB MATERI	LEVEL
1. Pengantar. 1.1 Akuntansi sebagai profesi 1.2 Etika dan etika profesi	1
2. Teori etika dan pengambilan keputusan beretika. 2.1 Teori etika 2.1.1 Egoisme. 2.1.2 Utilitarianisme. 2.1.3 Deontologi. 2.1.4 Teori keadilan. 2.1.5 <i>Virtue ethics</i> . 2.2 Pengambilan keputusan beretika 2.2.1 Kerangka pengambilan keputusan beretika. 2.2.2 <i>Stakeholder impact analysis</i> .	3 2
3. Lingkungan etika dan akuntansi. 3.1 Praktik-praktik bisnis tidak beretika. 3.2 Tuntutan masyarakat terhadap bisnis. 3.3 Inisiatif untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan.	1
4. Etika akuntan profesional. 4.1 Kode Etik Akuntan Profesional 4.2 IFAC Code of Ethics (Part A. General Application of Code, Part B. Professional Accountants in Public Practice (Overview)) dan Part C. Professional Accountants in Business) 4.3 Kode etik profesi akuntan publik	2
5. Iklim etika dan integritas organisasi 5.1 Mengelola organisasi yang berintegritas (<i>managing for organizational integrity</i>). 5.2 Menciptakan struktur korporasi yang beretika (<i>creating ethical corporate structure</i>).	1
6. Alasan diperlukan tata kelola yang baik dan etika bisnis 6.1 Teori keagenan. 6.1.1 Hubungan prinsipal dan agen. 6.1.1.1 Pemegang saham dan manajemen. 6.1.1.2 Pemegang saham publik dan pemegang saham pengendali. 6.1.1.3 Kreditur dan manajemen. 6.1.1.4 Pemangku kepentingan lainnya dan manajemen. 6.1.2 Pemicu konflik kepentingan dan masalah keagenan yang timbul (informasi asimetri dan perilaku <i>self-interest</i>). 6.2 Peran tata kelola dan tata kelola bisnis untuk mengatasi konflik kepentingan.	2

7. Definisi dan prinsip dasar tata kelola 7.1 Transparansi. 7.2 Akuntabilitas. 7.3 Responsibilitas. 7.4 Independensi. 7.5 Kewajaran (<i>fairness</i>).	1
8. Tinjauan struktur tata kelola di Indonesia 8.1 Perbandingan struktur satu dewan dan dua dewan. 8.2 Organ korporat: RUPS, dewan komisaris dan direksi. 8.3 Hubungan antar organ.	1
9. Prinsip-prinsip tata kelola menurut OECD	3
10. Manfaat tata kelola bagi korporat dan lingkungan 10.1 Kinerja keuangan dan keunggulan kompetitif. 10.2 Nilai perusahaan. 10.3 Manfaat bagi pemangku kepentingan.	1
11. <i>Overview</i> regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia	3
12. Instrumen penilaian dan bukti empiris terhadap praktek tata kelola di Indonesia dan ASEAN 12.1 Penilaian tata kelola korporat Indonesia oleh Bank Dunia. 12.2 Penilaian berdasarkan ASEAN CG <i>Scorecard</i> dari ASEAN <i>Capital Market Forum</i> .	2
13. Prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham 13.1 Hak-hak dasar pemegang saham. 13.2 Keputusan material yang memerlukan persetujuan RUPS. 13.3 RUPS, Penyelenggaraan RUPS yang transparan, wajar, dan akuntabel. 13.4 Pengungkapan struktur kepemilikan, termasuk kepemilikan piramid, <i>cash-flow right</i> , <i>control right</i> , dan hubungannya dengan insentif untuk ekspropriasi. 13.5 Peran investor institusi. 13.6 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham.	1
14. Prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. 14.1 Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. 14.2 Persetujuan dan pengungkapan hak untuk saham dengan kelas yang berbeda. 14.3 Transaksi dengan pihak berelasi/mengandung benturan kepentingan. 14.3.1 Transaksi dengan pihak berelasi yang efisien dan yang abusif 14.3.2 Penanganan transaksi dengan pihak berelasi 14.3.2.1 Pengungkapan 14.3.2.2 Proses persetujuan 14.4 Perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) 14.4.1 Cakupan <i>insider trading</i> 14.4.2 Penanganan <i>insider trading</i> 14.5 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakuan setara terhadap pemegang saham	2
15. Prinsip tanggung jawab dewan	1

<ul style="list-style-type: none"> 15.1 Rincian tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang perlu dilaksanakan. 15.2 Peran dewan komisaris dan direksi dalam menegakkan standar etika. 15.3 Proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi. 15.4 Ukuran, komposisi, dan kompetensi dewan komisaris 15.5 Asurans terhadap independensi komisaris independen. 15.6 Proses pelaksanaan tugas dewan komisaris dan direksi. 15.7 Akuntabilitas dewan komisaris dan direksi: penilaian kinerja terhadap dewan dan anggotanya. 15.8 Sistem remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi 15.9 Peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan. 15.10 Fungsi pengawasan. 15.11 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab dewan. 	
<ul style="list-style-type: none"> 16. Komite-komite di bawah dewan komisaris. <ul style="list-style-type: none"> 16.1 Manfaat keberadaan komite. 16.2 Komite audit. <ul style="list-style-type: none"> 16.2.1 Tugas dan tanggung jawab. 16.2.2 Kualifikasi. 16.2.3 Komposisi. 16.2.4 Wewenang. 16.2.5 Akuntabilitas. 16.3 Komite lain: Komite nominasi, komite remunerasi. 	2
<ul style="list-style-type: none"> 17. Pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal. <ul style="list-style-type: none"> 17.1 Kebijakan pengungkapan. 17.2 Prinsip ‘comply or explain’ terhadap CG code. 17.3 Informasi minimal yang perlu diungkapkan. 17.4 Pemanfaatan saluran komunikasi yang adil, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pengguna informasi. 17.5 Peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam mengurangi konflik keagenan dan penegakan GCG. 17.6 Peran akuntan profesional dalam memastikan terlaksananya prinsip pengungkapan dan transparansi. 	2
<ul style="list-style-type: none"> 18. Peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. <ul style="list-style-type: none"> 18.1 Asurans terhadap kualitas informasi yang diungkapkan dan sistem pengendalian internal. 18.2 Audit oleh pihak independen dan kompeten. 18.3 Tugas dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal dalam penegakan GCG. 	1
<ul style="list-style-type: none"> 19. Prinsip peran pemangku kepentingan dan tanggung jawab korporat. <ul style="list-style-type: none"> 19.1 Prinsip dan tanggung jawab korporat. 19.2 Pengakuan dan <i>respect</i> terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (karyawan, kreditur, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah). <ul style="list-style-type: none"> 19.2.1 Kebijakan dan program sistematis terhadap para pemangku kepentingan. 19.2.2 Fasilitasi terhadap keluhan pemangku kepentingan. 	1

19.3 Peran aktif korporat dalam memberantas korupsi. 19.4 Peran aktif korporat dalam melestarikan lingkungan. 19.5 Penyaluran pengaduan oleh pemangku kepentingan terhadap kemungkinan pelanggaran aturan/etika oleh orang dalam korporat. 19.6 Peran akuntan profesional dalam memfasilitasi peran pemangku kepentingan.	
--	--